

NASIONALISME ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA,

1900-1945

Oleh: Ririn Darini¹

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk melihat munculnya nasionalisme etnis Tionghoa di Indonesia. Nasionalisme etnis Tionghoa di Indonesia muncul karena pengaruh nasionalisme di China yang menggulingkan pemerintahan Dinasti Manchu. Dalam perkembangannya terdapat tiga aliran atau orientasi nasionalisme etnis Tionghoa yang berkembang di Indonesia.

Kata Kunci: China, Indonesia, nasionalisme etnis Tionghoa, dan pengaruh.

A. Pendahuluan

Munculnya nasionalisme Indonesia berkaitan erat dengan adanya kolonialisme Belanda di Indonesia. Usaha untuk menolak kolonialisme inilah yang merupakan manifestasi dari penderitaan dan tekanan-tekanan disebut nasionalisme. Melalui keinginan bersama yang didasarkan oleh persamaan kepentingan itu akhirnya menciptakan nasionalisme Indonesia.² Nasionalisme mengacu pada paham yang mementingkan perbaikan dan kesejahteraan nasio atau bangsanya. Kelompok-kelompok suku atau etnik-etnik yang bersifat lokal dikoordinasikan secara kolektif untuk menuju keinginan bersama dan klimaksnya adalah pembentukan nasion Indonesia. E Renan menyebut nasion sebagai

¹ Ririn Darini adalah staf pengajar pada jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

² Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional: dari Budi Utomo Samapai Proklamasi 1908-1945*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 6.

keinginan untuk ada bersama atau keinginan untuk hidup bersama.³ Etnik-etnik yang ada di Indonesia salah satunya adalah etnis Tionghoa.

Dalam penulisan sejarah Indonesia, peranan orang Tionghoa dalam berbagai hal hampir tidak pernah disebutkan secara panjang lebar meskipun banyak bukti sejarah yang menunjukkan sumbangan etnis Tionghoa bagi perkembangan Indonesia, misalnya dalam bidang agama, kesusasteraan, bahasa, kesenian, olah raga, bangunan, teknologi makanan dan dalam bidang kedokteran.⁴ Bahkan gambaran umum mengenai etnis Tionghoa di Indonesia yang ada selama ini adalah stigma bahwa golongan Tionghoa merupakan “binatang ekonomi” (*economic animal*) yang bersifat oportunistis, tidak memiliki loyalitas politik, tidak nasionalis, dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri.⁵ Walaupun masyarakat etnis Tionghoa disinggung dalam penulisan sejarah biasanya banyak berkaitan dengan perannya di bidang ekonomi sebagai penguasa jalur ekonomi perantara yang banyak merugikan masyarakat pribumi dari kota sampai pelosok desa.

Berkaitan dengan masalah nasionalisme khususnya dalam usaha mencapai kemerdekaan, benarkah bahwa etnis Tionghoa tidak memiliki rasa nasionalisme? Tulisan ini akan mencoba menempatkan golongan etnis Tionghoa berkaitan dengan perjuangan mencapai kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bagaimana orientasi nasionalisme yang ada pada golongan etnis Tionghoa di Indonesia. Nasionalisme di kalangan etnis Tionghoa di Indonesia ditengarai

³ *Ibid.*, hlm. 4.

⁴ Lebih lanjut lihat Kong Yuanzhi, *Silang Budaya Tiongkok-Indonesia*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2005).

⁵ Didi Kwartanada, “Minoritas Tionghoa dan Fasisme Jepang: Jawa, 1942-1945”, Lembaga Studi Realino (ed.), *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa*, (Yogyakarta: Kanisius dan Lembaga Studi Realino, 1996).

muncul sejak tahun 1900 dengan didirikannya *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK). Kajian ini dibatasi sampai dengan tahun 1945 dengan diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia.

B. Sejarah dan Perkembangan Etnis Tionghoa di Indonesia

Berdasarkan fakta sejarah, orang-orang Tionghoa diketahui telah lama datang ke Indonesia. Kedatangan mereka tidak saja untuk keperluan berdagang tetapi juga kepentingan-kepentingan lain seperti penyebarluasan agama Budha dan pengetahuan-pengetahuan lain seperti sastra dan lain sebagainya.

Menurut catatan sejarah, awal mula datangnya orang-orang Tionghoa ke Indonesia dapat ditelusuri sejak masa Dinasti Han (206 SM – 220 M). Pada masa itu, Tiongkok telah membuka hubungan perdagangan dengan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, dan menurut catatan sudah ada orang Tionghoa yang datang ke Pulau Jawa (Djawa Dwipa). Pada masa Dinasti Tang (618 – 907 M) juga didapati orang-orang Tionghoa di Kerajaan Sriwijaya. Jauh pada paruh kedua abad ke-9, ketika tentara pemberontak pimpinan Huang Chao menduduki Guangzhou, muslim Tionghoa serta saudagar Arab dan Persia yang berjumlah besar dan bermukim di sekitar Guangzhou berbondong-bondong mengungsi ke Sriwijaya. Selanjutnya pada masa dinasti Ming, orang-orang Tionghoa datang bersamaan dengan ekspedisi Laksamana Cheng Ho sebanyak tujuh kali ke Nusantara.⁶

⁶ Kong Yuanzhi, *Silang Budaya Tiongkok-Indonesia*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2005), hlm. 23-25.

Pada saat kedatangan Cheng Ho yang pertama, sudah banyak terdapat etnis Tionghoa di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Pada akhir masa dinasti Ming (1368-1644) dan awal Dinasti Ching (1644-1911), jumlah imigran etnis Tionghoa yang datang ke Nusantara semakin bertambah. Hal ini disebabkan adanya penyerangan bangsa Manchu terhadap Dinasti Ming sehingga banyak penduduk Tiongkok yang bermigrasi untuk menghindari peperangan. Para perantau kebanyakan berasal dari propinsi-propinsi di Cina Selatan, seperti propinsi Kwangtung, Fukien, Kwangsi, dan Yunan. Para perantau tidak berasal dari satu suku bangsa, tetapi paling sedikit delapan suku bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda. Orang Cina di Indonesia sebagian berasal dari empat suku bangsa, yaitu Hokkien, Hakka atau Kheh, Tiu-Chiu, dan orang kota Kanton.⁷

Di Indonesia, suku Hokkien hidup dengan cara berdagang, orang Kanton di samping mempunyai kepandaian berdagang juga mempunyai ketrampilan di bidang pertukangan dan teknologi, orang Hakka bekerja di pertambangan sehingga mereka banyak terdapat dan tinggal di daerah pertambangan seperti Bangka dan Belitung, dan orang Tiu-Chiu banyak melakukan usaha di bidang perkebunan.⁸ Jika pada tahun 1628 jumlah warga etnis Tionghoa di Batavia baru berjumlah 3000 jiwa, maka pada tahun 1739 telah meningkat menjadi 10.574

⁷ Victor Purcell, *The Chinese in Southeast Asia*, (London: Oxford University, 1987), hlm. 52.

⁸ *Ibid.*

jiwa.⁹ Pada tahun 1815 dari total jumlah penduduk di Jawa sebesar 4.615.270 jiwa, terdapat 94.441 orang (2,04%) dari golongan Tionghoa.¹⁰

C. Kolonialisme dan Kedudukan Etnis Tionghoa

Pemerintah kolonial Belanda menggunakan prinsip *divide et impera* untuk menguasai wilayah jajahannya. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pribumi maka jumlah penduduk Belanda adalah sangat kecil. Dalam usahanya mengendalikan penduduk pribumi yang mayoritas, pemerintah kolonial menggunakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu, misalnya kelompok bangsawan pribumi yang diperbolehkan menduduki posisi pemerintahan dan kelompok-kelompok minoritas asing seperti orang-orang Tionghoa yang hanya diperbolehkan bergerak di bidang ekonomi.

Pemerintah kolonial Belanda melakukan politik separatisme antargolongan penduduk atau mencoba mengisolasi antara satu golongan dengan golongan yang lain.¹¹ Penduduk dibagi dalam tiga golongan, yaitu warga negara kelas satu yang terdiri dari orang-orang Belanda dan bangsa kulit putih umumnya, warga negara kelas dua yang terdiri dari *Vreemde Oosterlingen* yaitu orang India, Arab, Tionghoa, dan orang-orang Timur Asing lainnya¹², dan warga negara kelas tiga

⁹ Hembing Wijayakusuma, *Pembantaian Massal 1740: Tragedi Berdarah Angke*, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2005), hlm. Viii.

¹⁰ Lembaga Studi Realino (ed.), *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa*, (Yogyakarta: Kanisius dan Lembaga Studi Realino, 1996), hlm. 11.

¹¹ Onghokham, "Pengaruh Gerakan Cina dalam Kebangkitan Nasional", dalam Abdul Baqir Zein, *Etnis Cina dalam Potret Pembauran di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Insan Indonesia, 2000), hlm. 146-151.

¹² Orang Jepang mendapatkan status hukum yang sama seperti orang Belanda pada tahun 1899. Negara Jepang yang modern dan kuat dapat melindungi dan meningkatkan posisi orang Jepang di Hindia, sementara negara Tiongkok yang masih lemah dan belum modern tidak dapat

yang terdiri dari penduduk pribumi. Penggolongan kelas masyarakat menimbulkan eksklusivisme, karena masing-masing golongan masyarakat tersebut diposisikan dalam stratifikasi sosialnya masing-masing dan tidak boleh diperbaurkan.

Orang-orang Tionghoa juga mendapatkan perlakuan hukum dan peradilan yang diskriminatif. Dalam perkara kriminal, tertuduh Tionghoa harus diadili di *Landraad*, yaitu pengadilan bagi warga pribumi karena dalam aturan hukum pidana orang Tionghoa statusnya disamakan dengan kaum pribumi (*gelijkgesteld met de Inlanders*). Dalam perkara sipil/perdata yang berkaitan dengan soal perdagangan, hutang-piutang, dan harta warisan, peradilan orang Tionghoa ditangani *Raad van Justitie*, yaitu peradilan untuk orang Eropa, apalagi sejak tahun 1848 hukum dagang Hindia Belanda (*Wetboek van Koophandel*) memasukkan orang Tionghoa dalam yurisdiksinya.

Menjelang akhir abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda juga mengeluarkan aturan-aturan lain yang intinya adalah untuk membatasi gerak langkah etnis Tionghoa di Indonesia. Melalui *Wijkenstelsel* pemerintah kolonial menciptakan sejumlah pusat pemukiman etnis Tionghoa di beberapa kota besar di Indonesia yang disebut sebagai kampung pecinan. Etnis Tionghoa diisolasi secara fisik sehingga antara etnis Tionghoa dengan penduduk pribumi benar-benar terpisah. Selain *wijkenstelsel*, pemerintah kolonial juga memberlakukan *passenstelsel* (pas jalan) yang mengharuskan etnis Tionghoa untuk meminta izin bila akan melakukan perjalanan.

melakukannya. Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm. 47.

Aturan yang menghambat dan diskriminatif tersebut baru dihapuskan pada tahun 1925, sejalan dengan dijalankannya sistem desentralisasi pemerintahan di negara koloni. Namun demikian status kewarganegaraan orang Tionghoa yang digolongkan dalam masyarakat

D. Nasionalisme Tiongkok

Tonggak awal munculnya nasionalisme Tionghoa adalah dengan didirikannya *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK) atau perkumpulan Tionghoa di Jakarta oleh orang-orang Tionghoa berpendidikan Barat. Perlakuan hukum dan peradilan yang diskriminatif oleh pemerintah Kolonial Belanda telah membangkitkan kesadaran nasional di kalangan etnis Tionghoa di Indonesia. Kunci untuk meningkatkan posisi orang Tionghoa adalah kemajuan dan perlindungan negara. Gerakan nasionalisme Tionghoa ini menuntut persamaan hak antara orang-orang Tionghoa dengan Belanda. Menurut Onghokham, sifat gerakan ini eksklusif, artinya gerakan demi golongan sendiri dan tidak ada hubungannya dengan anti kolonialisme, meskipun gerakan tersebut anti pemerintah kolonial.¹³

THHK banyak mendirikan sekolah-sekolah untuk warga etnis Tionghoa dan mendidik mereka untuk menjadi nasionalis Tiongkok. Buku-buku pelajaran yang digunakan di THHK umumnya diimpor dari Tiongkok atau Singapura yang isinya tidak sesuai dengan keadaan di Indonesia. Akibatnya murid-murid THHK

¹³ Onghokham, *op.cit.*

merasa asing dari masyarakatnya dan tanah airnya, walaupun mereka telah turun-temurun di Indonesia.¹⁴

THHK terus mencari saran, bantuan, dan perlindungan dari negeri Tiongkok. Dinasti Ch'ing yang melihat kesempatan memperoleh kemakmuran orang Tionghoa di Indonesia memberikan tanggapan positif. Sejak tahun 1906 pejabat tinggi dari Dinasti Ch'ing berkunjung ke Indonesia setiap tahun. Selanjutnya didirikan *Siang Hwee* (kamar dagang Tionghoa) di pusat-pusat perdagangan. *Siang Hwee* memboikot perusahaan Eropa untuk melindungi kepentingan dagang Tionghoa.¹⁵

Seiring dengan berkembangnya sekolah-sekolah THHK, kaum revolusioner yang mendukung Sun Yat Sen datang ke Hindia dan menjadi guru di sekolah-sekolah THHK. Sejak tahun 1909 mereka mendirikan *Soe Po Sia*, perkumpulan membaca yang menyebarkan informasi dan propaganda politik bagi orang Tionghoa. Di perkumpulan ini diberikan pelajaran, buku, dan terbitan berkala untuk publik Tionghoa.

Surat kabar berbahasa peranakan Tionghoa, *Sin Po*, mendukung nasionalisme politik Tionghoa. Mereka mendesak masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda meninggalkan kekawulaan Belanda, dan menarik diri dari institusi-institusi politik lokal tetapi terlibat secara aktif dalam politik di Tiongkok.¹⁶ Kalangan nasionalis *Sin Po* tidak berhasrat bekerja sama dengan Belanda. Mereka

¹⁴ Tjoa Siek Ien dan Siau Giok Tjhan, "Soal Pengajaran bagi Anak-anak Panakan Tionghoa Warga Negara Indonesia", dalam Leo Suryadinata (ed.), *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*, (Jakarta: INTI dan LP3ES, 2002), hlm. 272.

¹⁵ Takashi Shiraishi, *op.cit.*, hlm. 48.

¹⁶ Leo Suryadinata (ed.), *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*, (Jakarta: INTI dan LP3ES, 2002), hlm.5.

menginginkan kesetaraan dengan Belanda di depan hukum. Mereka juga menuntut pendidikan Tionghoa bagi kaum Tionghoa di Hindia Belanda.

Dengan runtuhnya Kekaisaran Manchu di Tiongkok, orang-orang Tionghoa mulai berani mengatakan kepada kaum bumiputera bahwa republik yang baru akan segera mengusir Belanda, dan orang Tionghoa akan menjadi penguasa dan tuan bagi mereka. Mereka menuntut kaum bumiputera untuk menyebut mereka “toean” dan memberi hormat, sama seperti yang dilakukan kaum bumiputera terhadap priyayi dan orang Belanda.¹⁷

E. Nasionalisme Hindia Belanda

Nasionalisme etnis Tionghoa yang berorientasi pada Hindia Belanda diwakili oleh organisasi politik *Chung Hwa Hui* (CHH) yang didirikan pada tahun 1928. Gerakan ini mendapatkan dukungan dari kalangan intelektual peranakan. Kelompok ini menganjurkan menerima kekawulaan Belanda dan aktif berpartisipasi dalam lembaga-lembaga politik lokal termasuk dalam *Volksraad* (Dewan Rakyat). Para tokoh CHH lebih mendukung pendidikan Belanda daripada pendidikan Tionghoa karena mereka melihatnya sebagai sebuah cara yang baik untuk bisa berhasil dalam masyarakat kolonial.

Orang-orang CHH tidak merasa puas dengan status hukum yang rendah (inferior) dari masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda. Mereka menuntut sebuah status hukum yang akan menempatkan golongan Tionghoa setara dengan Eropa (Belanda) dan golongan Jepang yang dipandang sebagai golongan Eropa di depan

¹⁷Takashi Shiraishi, *op.cit.*, hlm. 49.

hukum. Namun upaya tersebut tidak berhasil karena pihak otoritas Belanda khawatir bahwa gerakan seperti itu akan menimbulkan kemarahan masyarakat pribumi dan akan menyebabkan kekacauan dalam masyarakat kolonial.¹⁸

F. Nasionalisme Indonesia

Pada tahun 1932 didirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang secara langsung menentang *Chung Hwa Hui*. PTI meminta masyarakat Tionghoa Hindia Belanda untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai masyarakat Indonesia dan menyetujui upaya kalangan nasionalis Indonesia dalam membentuk sebuah pemerintahan sendiri dan akhirnya Indonesia yang merdeka melalui cara-cara konstitusional.¹⁹ PTI bersikap anti Belanda dan menolak nasionalisme Tiongkok. PTI bekerja sama dengan pergerakan nasionalis Indonesia.

Selain melalui PTI, orang-orang etnis Tionghoa di Indonesia tidak sedikit yang terlibat dalam dunia pergerakan nasional, mereka turut andil dalam menacapai kemerdekaan. Misalnya, turut sertanya etnis Tionghoa dalam “Sumpah Pemuda” yang telah meletakkan dasar yang penting bagi lahirnya bangsa Indonesia, yaitu Kwee Thiam Hong, Oey Kay Siang, John Lauw Tjoan Hok, Tjio Djien Kwie. Selain itu juga terdapat empat orang Tionghoa yang duduk dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yaitu Oei Tjong Hauw, Oei Tiang Tjoei, Mr. Tan Eng Hua, dan Liem Koen Hian.

¹⁸ Leo Suryadinata, *op.cit.*

¹⁹ *Ibid*, hlm. 6.

Etnis Tionghoa yang turut meresmikan UUD 1945 dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah Jap Tjwan Bing.²⁰

G. Kesimpulan

Nasionalisme etnis Tionghoa di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh nasionalisme dan modernisasi yang tumbuh di Tiongkok sejak akhir abad ke-19. Terdapat tiga macam orientasi nasionalisme etnis Tionghoa di Indonesia, pertama nasionalisme yang berorientasi pada Tiongkok, dalam hal ini diwakili oleh *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK) yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan, *Sin Po* (Persuratkabaran), *Siang Hwee* (perdagangan), dan *Soe Po Sia* (politik). Kedua, kelompok intelektual berpendidikan Belanda yang berorientasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Kelompok ini diwakili oleh *Chung Hua Hui* (CHH). Ketiga, golongan nasionalis etnis Tionghoa yang berorientasi pada Indonesia. Kelompok ini diwakili oleh *Partai Tionghoa Indonesia* (PTI).

Partai Tionghoa Indonesia yang didirikan pada tahun 1932 merupakan contoh komunitas etnis Tionghoa peranakan yang memiliki keberpihakan politik dan ekonomi terhadap Indonesia. PTI telah mengidentifikasi diri sebagai warga negara Indonesia dan memiliki kepedulian yang tinggi untuk berjuang bersama partai politik yang pada saat itu telah ada untuk memperjuangkan nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia.

²⁰Eddie Lembong, "Tugas dan Kewajiban Etnis Tionghoa dalam Membangun Bangsa dan Negara" dalam Leo Suryadinata (ed.), *Pemikiran politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002* (Jakarta: INTI dan LP3ES, 2002), hlm. 383.

Daftar Pustaka

- Abdul Baqir Zein, *Etnis Cina dalam Potret Pembauran di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Insan Indonesia, 2000.
- Eddie Lembong, “Tugas dan Kewajiban Etnis Tionghoa dalam Membangun Bangsa dan Negara” dalam Leo Suryadinata (ed.), *Pemikiran politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002* (Jakarta: INTI dan LP3ES, 2002).
- Heming Wijayakusuma, *Pembantaian Massal 1740: Tragedi Berdarah Angke*, Jakarta: Penerbit Populer Obor, 2005.
- I Wibowo (ed.), *Harga yang Harus Dibayar: Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Pusat Studi Cina, 2001.
- Kong Yuanzhi, *Silang Budaya Indonesia-Tiongkok*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2005.
- Lembaga Studi Realino (ed.), *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa*, Yogyakarta: Kanisius dan Lembaga Studi Realino, 1996.
- Leo Suryadinata (ed.), *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia, 1900-1945*, Jakarta: INTI dan LP3ES, 2002.
- Purcell, Victor, *The Chinese in Southeast Asia*, London: Oxford University, 1987.
- Shiraishi, Takashi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005.
- Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional: dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Twang Peck Yang, *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*, Yogyakarta: Niagara, 2005.